



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Sambas. Paripurna pengesahan tersebut digelar di ruang sidang utama DPRD Kab Sambas, Kamis (27/9). Dihadiri Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc, Sekda Kab Sambas Drs H Uray Tajudin Msi, Asisten Setda dan Staf Ahli Bupati Sambas.

Pengesahan Perubahan itu ditandatangani Ketua DPRD Kab Sambas Ir H Arifidiar MH selaku pimpinan Paripurna. Sebelumnya, Ketua DPRD menegaskan pengesahan dengan mengemukakan pertanyaan kepada Anggota DPRD yang mengikuti paripurna. Mayoritas Anggota DPRD yang hadir langsung serentak dan kompak menyatakan setuju untuk disahkan.

Pembacaan pendapatan akhir fraksi pengesahan Perubahan APBD 2018 ini tidak seperti pengesahan rancangan peraturan daerah yang lalu-lalu. Jika sebelum-sebelumnya masing-masing fraksi mengemukakan pendapat akhir fraksi yang disampaikan masing-masing juru bicara fraksi, kali ini, hanya satu orang saja yang membacakan resume pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan APBD 2018. H Mulyadi H Jantan dari Fraksi Partai Golkar yang juga bagian dari Badan Anggaran Legislatif mewakili semua fraksi membacakan pendapat akhir fraksi.

Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc bersyukur, Perubahan APBD 2018 akhirnya disahkan. Dia mengapresiasi kinerja semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif dalam keseriusan membahas perubahan anggaran tersebut. "Atas nama Pemerintah Daerah saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kab Sambas, seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan lapisan masyarakat yang telah memberikan masukan mulai dari pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan sampai pada pembahasan rancangan peraturan daerah ini," ujar dia.

Kata Bupati ini adalah bentuk silaturahmi dan musyawarah yang baik antar komponen masyarakat. Jelas dia, perubahan APBD ini sangat penting. "Pembahasan ini merupakan upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di kab sambas," ujar dia.

Dibacakan H Mulyadi H Jantan, diketahui bahwa Pendapatan Daerah ditargetkan semula 1,596 Triliun Rupiah bertambah sebesar 106 milyar rupiah atau 6,6 persen. Hal itu mengakibatkan pendapatan daerah ditargetkan menjadi 1,702 triliun rupiah. "Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 100,27 milyar rupiah atau 96,66 persen dari yang ditargetkan sebesar 103, 74 milyar rupiah menjadi sebesar 204,02 milyar rupiah," jelas dia.

Legislator Partai Golkar ini mengungkapkan, peningkatan itu mulai dari pajak hotel, restoran,

penerangan jalan, parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pajak daerah lainnya lanjut dia tidak mengalami perubahan target. “Dari retribusi daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2018 tidak mengalami perubahan. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan,” sebut dia.

Lain-lain PAD yang sah terang Mulyadi mengalami peningkatan sebesar 95,36 milyar rupiah atau 129,43 persen dari yang semula ditargetkan sebesar 73,67 milyar rupiah setelah perubahan APBD menjadi sebesar 169,04 milyar rupiah. Untuk Dana Perimbangan, dipaparkannya, secara keseluruhan tidak mengalami perubahan.

“Target dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 6,066 milyar atau 2,63 persen dari yang ditargetkan semula sebesar 230,79 milyar rupiah menjadi sebesar 236,86 milyar rupiah,” ungkapnya. Peningkatan tersebut dirinci dia berasal dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 476 juta rupiah atau 4,81 persen, bagi hasil nama dari bea balik nama kendaraan bermotor 1,084 milyar rupiah atau 11,77 persen, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor 2,443 milyar atau 12,97 persen, bagi hasil dari pajak rokok sebesar 1,024 milyar rupiah atau 5,39 persen dan dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 1,037 milyar rupiah atau 0,60 persen.

Terkait Belanja Daerah, Mulyadi menerangkan semula dianggarkan sebesar 1,619 Triliun Rupiah naik 7,33 persen sehingga menjadi 1,738 triliun rupiah. Pada Belanja tidak langsung, tutur dia, dianggarkan sebesar 938,36 milyar rupiah dalam perubahan APBD Tahun 2018, berkurang sebesar 8,32 milyar atau 0,89 persen menjadi 930,03 milyar rupiah. “Belanja langsung semula dianggarkan sebesar 681,46 milyar rupiah mengalami kenaikan sebesar 127,06 milyar rupiah sehingga menjadi sebesar 808,53 milyar rupiah atau 18,65 persen,” terangnya.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dengan rincian pendapatan daerah pada perubahan APBD ditarget sebesar 1,702 triliun rupiah sedangkan belanja daerah mencapai 1,738 triliun rupiah mengakibatkan defisit anggaran sebesar 35,89 milyar rupiah. “Hal itu akan ditutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2017 dan pinjaman daerah” imbuhnya.